



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 180 / 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 180/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 02 JAN 2024
Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Kabupaten Brebes; dan
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 180 / 7 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

NO	JUDUL	PENGUSUL
1.	DEWAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA
2.	PEDOMAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES	DINDIKPORA
3.	PENDIDIKAN KARAKTER	DINDIKPORA
4.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH KABUPATEN BREBES	DINDIKPORA
5.	GERAKAN MENURUNKAN ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH MELALUI MODEL HYBRID LEARNING (MAS MORNING) UNTUK MENINGKATKAN ANGKA RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BREBES	DINDIKPORA
6.	PENGELOLAAN PARTISIPATIF SALURAN TAMBAK DI KABUPATEN BREBES	DINKAN
7.	PEMBERDAYAAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME	KESBANGPOL
8.	RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2026	BAPERLITBANGDA
9.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025	BAPERLITBANDA
10.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024	BAPERLITBANGDA
11.	PENGARUS UTAMAAN GENDER	BAPERLITBANGDA
12.	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BAGIAN ORGANISASI

13.	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BAGIAN ORGANISASI
14.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BREBES	BAGIAN ORGANISASI
15.	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BAGIAN ORGANISASI
16.	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
17.	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
18.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
19.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
20.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
21.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGGUNGLANGAN BENCANA DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
22.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
23.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAGIAN ORGANISASI
24.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	BAGIAN ORGANISASI
25.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN	BAGIAN ORGANISASI
26.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
27.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN	BAGIAN ORGANISASI

28.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	BAGIAN ORGANISASI
29.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BAGIAN ORGANISASI
30.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM	BAGIAN ORGANISASI
31.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BAGIAN ORGANISASI
32.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BAGIAN ORGANISASI
33.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	BAGIAN ORGANISASI
34.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	BAGIAN ORGANISASI
35.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	BAGIAN ORGANISASI
36.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG	BAGIAN ORGANISASI
37.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN	BAGIAN ORGANISASI
38.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	BAGIAN ORGANISASI
39.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	BAGIAN ORGANISASI
40.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BAGIAN ORGANISASI
41.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL	BAGIAN ORGANISASI
42.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BAGIAN ORGANISASI
43.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BAGIAN ORGANISASI

44.	ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BAGIAN ORGANISASI
45.	PETA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
46.	ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
47.	EVALUASI JABATAN	BAGIAN ORGANISASI
48.	KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
49.	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BAGIAN ORGANISASI
50.	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	BAGIAN ORGANISASI
51.	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	BAGIAN ORGANISASI
52.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS	BAGIAN ORGANISASI
53.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 009 TAHUN 2013 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BAGIAN ORGANISASI
54.	SISTEM KERJA	BAGIAN ORGANISASI
55.	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
56.	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN BREBES	DISHUB
57.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI	BPKAD
58.	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN	BPKAD

59.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN	BAGIAN KESRA
60.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BREBES	BAGIAN KESRA
61.	PEDOMAN PELAKSANAAN KAGIATAN/ PEKERJAAN BAGI PERANGKAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
62.	PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	INSPEKTORAT
63.	BATAS DESA CIAMPEL KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
64.	BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
65.	BATAS DESA KEMUKTEN KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
66.	BATAS DESA KRADENAN KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
67.	BATAS DESA KRAMATSAMPANG KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
68.	BATAS DESA KUBANGPARI KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
69.	BATAS DESA SINDANGJAYA KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
70.	BATAS DESA SUTAMAJA KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
71.	BATAS DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
72.	BATAS DESA JAGAPURA KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
73.	BATAS DESA KERSANA KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
74.	BATAS DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
75.	BATAS DESA PENDE KECAMATAN KERSANA	BAGIAN TAPEM
76.	BATAS DESA KARANGREJA KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
77.	BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
78.	BATAS DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
79.	BATAS DESA KEMURANG WETAN KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM

80.	BATAS DESA KRAKAHAN KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
81.	BATAS DESA KUPANGPUTAT KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
82.	BATAS DESA LUWUNGGEDE KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
83.	BATAS DESA LEMAHABANG KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
84.	BATAS DESA LUWUNGBATA KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
85.	BATAS DESA MUNDU KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
86.	BATAS DESA PEJAGAN KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
87.	BATAS DESA PENGARADAN KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
88.	BATAS DESA SARIREJA KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
89.	BATAS DESA SENGON KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
90.	BATAS DESA SIDAKATON KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
91.	BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
92.	BATAS DESA TEGONGAN KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
93.	BATAS DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG	BAGIAN TAPEM
94.	BATAS DESA BAROS KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
95.	BATAS DESA BUARA KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
96.	BATAS DESA BULAKELOR KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
97.	BATAS DESA CIDUWET KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
98.	BATAS DESA CIKEUSAL KIDUL KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
99.	BATAS DESA CIKEUSAL LOR KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
100.	BATAS DESA CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
101.	BATAS DESA DUKUHBADAG KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
102.	BATAS DESA DUKUHTENGAH KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM

103.	BATAS DESA JEMASIH KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
104.	BATAS DESA KARANGBANDUNG KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
105.	BATAS DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
106.	BATAS DESA KUBANGJATI KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
107.	BATAS DESA KUBANGWUNGU KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
108.	BATAS DESA KUBANGSARI KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
109.	BATAS DESA PAMEDARAN KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
110.	BATAS DESA SINDANGJAYA KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
111.	BATAS DESA TANGGUNSARI KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
112.	BATAS DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
113.	BATAS DESA DUKUHTURI KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
114.	BATAS DESA PADAKATON KECAMATAN KETANGGUNGAN	BAGIAN TAPEM
115.	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES	BAGIAN TAPEM
116.	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES	BAGIAN TAPEM
117.	PAJAK DAERAH	BAPENDA
118.	RETRIBUSI DAERAH	BAPENDA
119.	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	BAPENDA
120.	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BREBES	BAPENDA
121.	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH	BAPENDA
122.	DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA	BKPSDMD
123.	MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL	BKPSDMD
124.	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH	BPKAD

125.	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BPKAD
126.	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
127.	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
128.	ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
129.	STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
130.	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
131.	PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BPKAD
132.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
133.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
134.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
135.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
136.	PETUNJUK TEKNIK INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
137.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD

138.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
139.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
140.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
141.	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
142.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
143.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
144.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
145.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
146.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
147.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD

148.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
149.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
150.	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD
151.	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD
152.	ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD
153.	STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD
154.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
155.	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
156.	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
157.	PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	DINARPUS
158.	PEDOMAN PENYUSUTAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	DINARPUS
159.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 35 TAHUN 2023 JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH	DINARPUS
160.	PEDOMAN TATA CARA PEMBINAAN SANKSI ADMINISTRASI	DINARPUS
161.	TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN IMBALAN	DINARPUS

162.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	DINARPUS
163.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES	DINARPUS
164.	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	DINARPUS
165.	PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	DINARPUS
166.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN PENINGKATAN LITERASI DI KABUPATEN BREBES	DINARPUS
167.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL
168.	PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	DINKOMINFOTIK
169.	MASTERPLAN BREBES SMART CITY TAHUN 2022-2026	DINKOMINFOTIK
170.	PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	DINKOMINFOTIK
171.	PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BREBES	DINKOMINFOTIK
172.	PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	DINKOMINFOTIK
173.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN BREBES	DINKOMINFOTIK
174.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA	DINPERMADES

175.	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA	DINPERMADES
176.	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	DINPERWASKIM
177.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETANGGUNGAN-KERSANA	DPSDAPR
178.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KAWASAN PERKOTAAN BUMIAYU	DPSDAPR
179.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BREBES	DPSDAPR
180.	POLA TARIF	RSUD BUMIAYU
181.	HOSPITAL BY LAWS	RSUD BUMIAYU
182.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS C	RSUD BUMIAYU
183.	TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN	DINKES
184.	PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BREBES	DINKES
185.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES	DINKES
186.	RETRIBUSI SAMPAH PADA KAWASAN KOMERSIAL (KAWASAN TERTENTU)	DLH
187.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN POHON	DLH

188.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA	DINPERMADES
189.	PENGELOLAAN PENGADUAN	BAGIAN HUKUM
190.	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES	BPKAD
191.	BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA	DINPERMADES
192.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL	DINSOS
193.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES	DPMPTSP
194.	SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU	DINKES
195.	RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BREBES TAHUN 2024 - 2029	DINKES
196.	PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BREBES	BPKAD
197.	RENCANA TENAGA KERJA DAERAH TAHUN 2024-2029	DINPERINAKER
198.	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	DINPERINAKER
199.	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	BAGIAN HUKUM
200.	PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	BAPENDA
201.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI
202.	FASILITASI PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH	BAGIAN KESRA
203.	PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	DINKOMINFOTIK

Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR